

Peran Kepemimpinan Partisipatif Dalam Meningkatkan Kolaboratif Masyarakat Pada Program “*Sumbar Bersatu*” Untuk Pengelolaan Sampah Di Sumatera Barat

Iqbal Fahrezi¹

Universitas Negeri Padang

Email: iqbalfahrezi2002@gmail.com

Syamsir²

Universitas Negeri Padang

Email: syamsirsaili@yahoo.com

Riffa Dwi Berliana³

Universitas Negeri Padang

Email: rivvadwii123@gmail.com

Filzah Sabrila⁴

Universitas Negeri Padang

Email: filzah078@gmail.com

Elsa Oktaviani⁵

Universitas Negeri Padang

Email: elsaoktavianii095@gmail.com

Huriyatul Husna⁶

Universitas Negeri Padang

Email: huriyatulhusna0600@gmail.com

Giva Febria Esa Rahman⁷

Universitas Negeri Padang

Email: givafebriaesarahman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya sampah yang berada di Sumatera Barat yang kemudian terbentuklah program Sumbar Bersatu dalam mengelola sampah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan kolaborasi masyarakat dalam program “Sumbar Bersatu” yang difokuskan pada pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berperan signifikan dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat, meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor seperti komunikasi dua arah, keterbukaan terhadap masukan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam efektivitas kepemimpinan partisipatif tersebut termasuk dalam mensukseskan program Sumbar Bersatu. Hasil dari program tersebut terlihat lebih berdampak karena semakin menyusutnya sampah dan juga semakin banyaknya tempat pengelolaan sampah yang efektif. Implikasi penelitian ini memberitahukan bahwa program

Sumbar Bersatu harus terus dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang baik dan berjalan kedepan dalam mengelola dan mengatasi sampah di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Kepemimpinan; Partisipatif; Kolaboratif; Program; Sampah.

Abstract

This research was motivated by the large amount of waste in West Sumatra, which was then developed by the United West Sumatra program in managing waste. The purpose of this study is to analyze the role of participatory leadership in increasing community collaboration in the "United West Sumatra" program which is focused on waste management in West Sumatra Province, especially in case studies at the West Sumatra Environment Agency. A qualitative approach is used with the case study method, where data is obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results of the study show that participatory leadership implemented by the Environment Agency plays a significant role in encouraging active community involvement, increasing the sense of collective responsibility, and strengthening synergy between the government and citizens in waste management. Factors such as two-way communication, openness to input, and community empowerment are key elements in the effectiveness of participatory leadership, including in the success of the United West Sumatra program. The results of the program seem to have more impact because of the shrinking waste and also the increasing number of effective waste management places. The implications of this study inform that the United West Sumatra program must continue to be carried out by the government by using a good leadership style and moving forward in managing and overcoming waste in West Sumatra.

Keywords: Leadership; Participatory; Collaborative; Program; Garbage.

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sampah diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia, masalah ini tidak dapat dipungkiri selama aktivitas manusia terus berjalan. Nyatanya setiap tahun volume sampah selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang meningkat (Adawiyah & Akbar, 2023). Masalah sampah telah menjadi ancaman, jika masyarakat membuang sampah pada tempat yang tepat, seperti tempat pembuangan sampah, setidaknya sampah dapat dikurangi. Namun kenyataannya, masyarakat cenderung membuang sampah sembarangan. Selain itu, Indonesia terkenal sebagai negara Peringkat 3 (tiga) sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2024, hasil input dari 302 kabupaten/kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbulan sampah nasional mencapai angka 33,8 juta ton. Pengurangan sampah 4,4 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 59,87% atau 20,2 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 40,13% atau 13,5 juta ton sampah tidak terkelola (SIPSN, 2025). Kebersihan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap daerah karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah daerah (Susnawati, 2018), (Muhsinhukum, 2021). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu

menangani secara serius persoalan kebersihan, khususnya penanganan masalah sampah (Rahim, 2020).

Dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.” Dibutuhkan pula kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan, termasuk sampah rumah tangga. Pada tingkat pusat, penanganan sampah diperkotaan telah dilakukan oleh beberapa kementerian terkait, sedangkan ditingkat pemerintah daerah penanganan sampah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui dinas atau Unit Pelaksana Teknis di bawah suatu dinas yang bertugas khusus mengelola sampah atau kebersihan. Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah juga menjadi suatu momok yang menakutkan dalam lingkungan masyarakat. Masih banyak sampah yang berserakan, tidak hanya di jalan, bahkan disepanjang sungaipun terjadi pencemaran akibat sampah. Dengan demikian sampah adalah masalah krusial yang membutuhkan penanganan yang sangat intensif dari berbagai pihak (Mohd Noor et al., 2023).

Selain itu, Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien (Mahkamah Konstitusi, 1945). Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka Pemerintah Provinsi merupakan pihak yang secara institutional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat, menghadapi permasalahan serupa. Isu-isu terkini dalam Pengelolaan Sampah Sumatera Barat, antara lain keterbatasan infrastruktur, sampah plastik yang sulit terurai, peningkatan timbulan sampah, kesadaran masyarakat terbatas. Data yang terangkum dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2023, berdasarkan data pada neraca pengelolaan sampah Provinsi Sumatera Barat persentase sampah terkelola masih berada di angka 60,84% dan persentase sampah yang tidak terkelola sebesar 39,16% (SIPSN, 2025). Berdasarkan

dokumen paparan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat bertarikh 12 Januari 2024 juga menguak masalah terkait Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Banyak dari fasilitas limbah tersebut yang tidak beroperasi secara optimal. Namun, Dinas Lingkungan juga mengakui pengelolaan sampah juga terhambat berbagai persoalan, mulai dari urusan teknis, regulasi, pembiayaan, kelembagaan, hingga peran masyarakat. Dari sisi regulasi, sebagian daerah belum menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di wilayah mereka, termasuk urusan retribusinya. Melalui perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat memastikan adanya upaya untuk menyelesaikan masalah sampah di Sumatera Barat, salah satunya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018. Ada juga langkah revisi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang TPA Regional.

Salah satu program pemerintah yang menarik terutama Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat adalah terkait program "Sumbar Bersatu". Dimana program ini wajib dilakukan oleh semua pemerintah bupati/wali kota mulai 12 february 2025 beberapa bulan kemarin. Dimana dalam program ini memiliki salah satu hal yang diupayakan pemerintah untuk berhasil mengurangi dan membuat sampah terkendali terutama di daerah-daerah yang sangat mengkhawatirkan, seperti Kota Padang yang menjadi menyumbang sampah terbesar mencapai 50 persen di Sumatera Barat. Hal ini mengingat di Sumatera Barat volume sampah di Sumbar mencapai 960.000 ton pada Tahun 2023, dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan program "Sumbar Bersatu" sangat bergantung pada efektivitas kepemimpinan dalam mendorong partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Dalam hal ini, kepemimpinan partisipatif menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Burhanuddin dalam bukunya mendefinisikan gaya kepemimpinan partisipatif sama pengertiannya dengan kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan-tindakan keputusan-keputusan diusulkan atau dikehendaki oleh pimpinan, serta berusaha memberikan dorongan untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusan dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan (Burhanudin, 2005). Gaya kepemimpinan partisipatif menekankan tingkat dukungan yang tinggi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan, tetapi hanya ada sedikit panduan dari para pemimpin. Artinya arahan kecil, yaitu pemimpin tidak hanya duduk diam dan memberi banyak perintah, tetapi pemimpin juga ikut serta di dalamnya, dalam proses kesepakatan bersama (Qorrotul A'yuni & Hijrawan,

2020). Dalam konteks pengelolaan sampah, pemimpin yang menerapkan pendekatan partisipatif tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan utama, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong komunikasi, kerja sama, serta inovasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, komunitas lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisis peran kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan kolaboratif masyarakat pada program “Sumbar Bersatu” untuk pengelolaan sampah di Sumatera Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif (Sugiyono, 2019), yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kepemimpinan partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan kolaborasi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada pengalaman, perspektif, dan interaksi sosial antara pemimpin dan masyarakat tentang Peran Kepemimpinan Partisipatif dalam Meningkatkan Kolaboratif Masyarakat pada Program Sumbar Bersatu untuk pengelolaan sampah di Sumatera Barat (Akbar, 2024; Mohd Noor et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga pada aspek sosial dan kolaboratif yang penting dalam mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Lokasi penelitian ini berada di seputar pengelolaan sampah, terutama berdasarkan program dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat yang diamanahi oleh nasional. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yakni Februari sampai Maret 2025. Sumber penelitian ini berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa tokoh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat dan anggota bawahannya, dokumentasi dan observasi. Sumber pendukung penelitian berdasarkan laporan, hasil rapat, dan beberapa artikel yang mengarah kepada pembahasan ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah B Miles dan Huberman. Dimana dalam analisisnya terdapat analisis tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Hardani et al., 2020). Sedangkan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data dan sumber data penelitian (Agustini et al., 2023).

Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Sampah di Sumatera Barat dan Program “Sumbar Bersatu”

Di Sumatera Barat terkait program “Sumbar Bersatu” dalam mengatasi sampah dengan adanya perbaikan dan juga pengelolaan serta pengadaan tempat sesuai terkait tempat sampah. Salah satu kebijakannya yakni terkait dengan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan TPAS (Tempat Penampungan Sampah). Salah satu hal baru yang dilakukan kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat adalah memperbanyak dan memperbaiki system yang dirasa kurang maksimal. Salah satunya seperti renovasi TPAS Regional Payakumbuh sendiri yang awalnya dimanfaatkan untuk menampung sampah dari 4 (empat) kota/kabupaten di Sumatra Barat. Yakni, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Akan tetapi pada tanggal 20 Desember 2023, TPAS Regional Payakumbuh ditutup karena terjadinya longsor ditempat tersebut (Herman, 2023), yang menjadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin, Kota Padang, yang akan menampung sampah-sampah yang berasal dari Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Sementara itu Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan status masa tanggap darurat sampah dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang untuk menangani persoalan limbah. Sebagian sampah dari Kota Payakumbuh yang bisa mencapai 80-100 ton per hari dikirim ke TPA Air Dingin, Padang. Tapi solusi itu bukan untuk jangka panjang karena ongkosnya yang tinggi.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional, Pasal 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan Sampah Regional adalah Pengelolaan Sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan Sampah dan bersumber dari dua atau lebih Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional yaitu tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari dua atau lebih Kabupaten/Kota. Pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.

Sebagaimana dijelaskan oleh pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018. Tujuan pengelolaan sampah regional untuk: meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan pada pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018. Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional meliputi: melakukan penelitian,

pengembangan teknologi penanganan Sampah Regional, memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah. Begitupula secara Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Usaha Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah.

Sampah telah menjadi persoalan lingkungan yang sangat serius di berbagai daerah termasuk Sumatera Barat. Semua pihak harus ambil bagian untuk mengatasi masalah ini. Bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yaitu membuat program Provinsi "Sumbar Bersatu" (Sumbar Bersih Sampah Terpadu), sebuah program berbasis kolaboratif yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Gerakan ini butuh kepedulian dari semua stakeholder, sinergi pemerintah kabupaten atau kota, serta kolaborasi dengan swasta melalui CSR. Program ini mengedepankan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam memilah, mendaur ulang, serta mengurangi produksi sampah secara mandiri. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini diharapkan dapat membangun kesadaran diri dan mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab. Ini diwujudkan dengan terus digaungkannya gerakan Satu Nagari Satu Sarana Tempat Pengolahan Sampah. Dengan harapan, bisa memperkecil volume sampah yang sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nantinya. Bisa berbentuk TPS3R, rumah maggot dan lain sebagainya. Program Sumbar Bersatu, diinisiasi guna mengurangi jumlah volume timbunan sampah harian yang menumpuk di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada di Sumbar.

"Dalam surat edaran tersebut, juga mewajibkan seluruh pemerintah untuk membuat sistem penanganan sampah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Kemudian, meminta seluruh Bupati/Walikota untuk memperbaiki tata Kelola pengelolaan sampah di daerah lewat penguatan regulasi dan penegakan hukum, perbaikan kelembagaan dan dukungan pendanaan untuk pengelolaan sampah paling sedikit 3 persen dari APBD dalam pengelolaan sampah," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar, Tasliatul Fuadi (11/2/2025)

Tasliatul mengungkapkan, selajutnya melakukan pembenahan dan menata ulang semua operasional Tempat Pemrosesan Akhir Sampah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria sanitary landfill atau controlled landfill. Serta, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti Asosiasi Daur Ulang, Bank Sampah, Asosiasi Maggot dan lain-lain yang berjalan di daerah. Termasuk juga penegasan terkait prinsip 3R.

Departemen Pekerjaan Umum (2017) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut: Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

"Pemprov juga berkomitmen mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup melalui program Sumbar Bersatu (Sumbar Bersih Sampah Terpadu) dengan melibat stakeholder terkait seperti Badan usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Hal itu sebagai upaya mengurangi sampah seperti pelarangan penggunaan secara bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai," ujarnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar (11/2/2025).

Peran Kepemimpinan Partisipatif dalam Meningkatkan Kolaborasi Masyarakat dalam Program "Sumbar Bersatu" untuk Pengelolaan Sampah di Sumatera Barat

Kepemimpinan partisipatif berperan penting dalam meningkatkan kolaborasi masyarakat dalam program "Sumbar Bersatu" untuk pengelolaan sampah di Sumatera Barat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, kepemimpinan partisipatif mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program (Permana & Karwanto, 2020). Hal ini dapat dicapai melalui dialog terbuka, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi dan strategi pengelolaan sampah.

Salah satu contoh konkret peran kepemimpinan partisipatif dalam program "Sumbar Bersatu" adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang fokus pada pengelolaan sampah di tingkat desa atau kelurahan yang lebih efektif. Hal ini kemudian diperkuat penelitian lainnya yang menyatakan bahwa di Sumatera Barat lebih banyak desa di Kabupaten Lima yang telah melakukan daur ulang sampah lebih baik (Fitria et al., 2018). Ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan partisipatif mendorong terbentuknya kelompok-kelompok ini dengan melibatkan masyarakat dalam pemilihan ketua, anggota, dan program kerja. Dengan demikian, kelompok-kelompok ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam mengelola sampah di lingkungan mereka.

Selain itu, kepemimpinan partisipatif juga mendorong terciptanya sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan melibatkan masyarakat (Lestari, 2017). Dimana di Sumatera Barat, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan menilai kinerja program "Sumbar Bersatu". Masukan dan penilaian ini kemudian digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif tidak hanya mendorong kolaborasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa program "Sumbar Bersatu" benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan di Sumatera Barat.

Peran Kepemimpinan Partisipatif dalam Meningkatkan Kolaborasi Masyarakat ini terlihat dalam beberapa dimensi penting. Berikut beberapa peran yang dilakukan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat dalam mensukseskan program Sumbar Bersatu yang meliputi enam hal. Pertama, mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Kepemimpinan partisipatif memungkinkan warga lokal merasa dihargai dan memiliki kontribusi nyata dalam proses pengelolaan sampah (Insan & Yuniawan, 2016). Maka dari itu, pemerintah Dinas

Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat melakukan dialog terbuka, musyawarah kampung, dan forum diskusi, pemimpin mendorong masyarakat untuk menyuarakan ide, kekhawatiran, dan solusi. Ini memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program Sumbar bersatu, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi aktif, bukan sekadar mengikuti instruksi dari atas. Tetapi mampu mengelola dalam mengatasi permasalahan sampah di Sumatera Barat.

Kedua, membangun kepercayaan sosial. Dalam banyak komunitas, masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah sering kali dipandang sebagai tanggung jawab pihak luar (pemerintah daerah, LSM, atau pihak ketiga). Kepemimpinan partisipatif yang dilakukan pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat dan beberapa bagian bahwa mampu membangun kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan hasil, serta pembagian tanggung jawab mendorong kepercayaan horizontal (antara sesama warga) dan vertikal (antara warga dan pemimpin) terus dilakukan di wilayah Sumatera Barat terutama terkait program Sumbar Bersatu terkait sampah. Ketiga, mengembangkan kapasitas lokal. Seorang pemimpin partisipatif bukan hanya pengarah, tetapi juga fasilitator pengembangan kapasitas. Dalam "Sumbar Bersatu", pemimpin mendorong pelatihan tentang pemilahan sampah, pembuatan kompos, daur ulang kreatif, dan pengelolaan bank sampah. Dengan meningkatkan kapasitas teknis masyarakat, kolaborasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, karena warga mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri, sehingga dari itu pemerintah selalu melakukan berbagai solusi kepada masyarakat.

Keempat, meningkatkan adaptasi dan inovasi lokal. Pendekatan partisipatif membuat program "Sumbar Bersatu" lebih responsif terhadap kondisi lokal. Alih-alih menerapkan solusi satu ukuran untuk semua, pemimpin partisipatif mendorong inovasi berbasis komunitas, misalnya dengan mendorong model pengelolaan sampah berbasis adat lokal, penggunaan teknologi sederhana yang tersedia di daerah, atau pengembangan ekonomi kreatif dari hasil daur ulang. Kelima, memperkuat solidaritas komunitas. Partisipasi dalam proyek bersama seperti pengelolaan sampah dapat mempererat hubungan sosial di dalam komunitas. Kepemimpinan partisipatif memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun budaya gotong royong, memperkuat nilai kebersamaan, dan menumbuhkan tanggung jawab kolektif. Ini sangat penting dalam jangka panjang agar program tidak hanya bertahan karena adanya insentif material, tetapi menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Maka dari itu, program ini melalui pemerintah selalu dilakukan sosialisasi dan kegiatan khusus untuk memaksimalkan program terkait sampah di Sumatera Barat.

Keenam, menyusun kebijakan dan tata kelola yang inklusif. Kepemimpinan partisipatif juga memainkan peran dalam merancang aturan bersama terkait pengelolaan sampah di Sumatera Barat. Misalnya, membuat kesepakatan tentang jadwal pengumpulan sampah, sanksi bagi pelanggaran, atau pembagian hasil dari pengelolaan bank sampah. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan lokal ini, aturan menjadi lebih legitimat dan dipatuhi secara sukarela. Ketujuh, mengatasi hambatan sosial dan budaya. Masalah pengelolaan sampah sering kali berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan persepsi lama (misalnya, anggapan bahwa membuang sampah di sungai adalah hal biasa) (Permana & Karwanto, 2020). Pemimpin partisipatif menggunakan pendekatan dialogis, bukan koersif, untuk mengubah norma sosial secara perlahan. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down yang bisa menimbulkan resistensi. Maka dalam hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Lingkungan hidup terutama di wilayah Kota atau Kabupaten hingga desa selalu berupaya adanya sosialisasi dan juga kegiatan terkait sampah yang merupakan lanjutan dan pelaksanaan dari program Sumbar Bersatu dari Provinsi.

Hal-hal diatas sesuai dengan teori leadership terkait peran kepemimpinan partisipatif dalam mengubah perilaku masyarakat, termasuk masyarakat di Sumatera Barat dalam hal sampah. Dimana dalam teorinya kepemimpinan partisipatif memiliki kontribusi yang signifikan dalam perubahan perilaku karena kepemimpinan partisipatif yang nyata, bukan hanya teori, adanya kerja sama stakeholder, yang dibuktikan dari pemerintah provinsi hingga daerah, adanya inovasi dan insentif terkait kegiatan atau program, adanya kesadaran bagi masyarakat (Peny et al., 2023). Dimana keempat hal tersebut telah terbukti di masyarakat Sumatera Barat melalui program Sumbar Bersatu.

Selain itu, untuk meningkatkan kerja sama masyarakat dalam program "Sumbar Bersatu", kepemimpinan partisipatif sangat penting. Model kepemimpinan ini membangun kepercayaan, keterlibatan aktif, dan rasa memiliki program pengelolaan sampah di Sumatera Barat. Pemimpin partisipatif dapat membangun lingkungan kerja yang mendorong tanggung jawab kolektif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, perumusan strategi, dan pelaksanaan program. Kelompok pengelolaan sampah di tingkat desa atau kelurahan membutuhkan kepemimpinan partisipatif. Di sini, kepemimpinan tidak hanya membantu, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara tujuan program dan kebutuhan masyarakat. Terbukti bahwa pemimpin yang mendengarkan, memungkinkan diskusi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dapat meningkatkan etika pelaksanaan program di lapangan.

Efektivitas Program "Sumbar Bersatu" dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Program "Sumbar Bersatu" merupakan program yang sudah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat soal pengelolaan sampah, program ini mulai dijalankan sejak tahun 2023 dengan harapan dapat mengubah gaya hidup masyarakat serta meningkatkan kepedulian terhadap masalah sampah yang semakin mendesak. Pemerintah sebagai penggerak utama program ini terus berupaya mensosialisasikan program dari tahun ke tahun (Putra, 2025). Program ini digagas oleh Pemerintah DLH Sumbar sebagai bentuk inisiatif strategis untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Program ini disosialisasikan kepada seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat, dengan harapan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tumbuh dari kesadaran dan kepedulian individu. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada lima peran penting, yaitu pemerintah, pihak swasta, akademisi, media, dan masyarakat.

Program ini dilatar belakangi dengan bentuk respons terhadap kondisi darurat sampah di Sumatera Barat. Hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah ini telah mendekati titik *over capacity*, memicu keprihatinan serius di lapisan masyarakat dan pemerintahan. Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menekan angka timbulan sampah, nyatanya hasilnya masih belum optimal. Target kebijakan daerah untuk pengurangan sampah sebesar 16% belum tercapai. Fakta ini menjadi landasan kuat bagi lahirnya gerakan "Sumbar Bersatu", yang fokus utamanya adalah mendorong pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara terpadu dan berkelanjutan (Wulandari & Frinaldi, 2020).

Salah satu langkah konkret dari program ini adalah mencanangkan gerakan "Satu Nagari, Satu Fasilitas Pengolahan Sampah". Melalui pendekatan ini, setiap nagari diharapkan memiliki infrastruktur pengelolaan sampah seperti rumah maggot, fasilitas pembuatan pupuk organik, hingga TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) yang dilengkapi dengan teknologi pemilahan dan pencacahan. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program ini juga mendorong lahirnya regulasi lokal berupa Peraturan Nagari (Perna) atau Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pencegahan, pengurangan, dan pengolahan sampah (Nasution, 2022). Regulasi ini menjadi pintu masuk bagi berbagai sumber pendanaan seperti Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumbar, hingga dana CSR dari perusahaan.

Efektivitas program ini tampak dari adanya respon positif di beberapa daerah. Terdapat kabupaten, kota, bahkan nagari yang telah secara spontan mengelola sampah di wilayahnya, meskipun program “Sumbar Bersatu” belum secara resmi diterapkan di sana. Ada kota dan nagari yang sudah lebih dulu bergerak, mengelola sampah secara mandiri tanpa menunggu instruksi dari atas. Hal ini sesuai dengan penelitian Aini bahwa puskesmas di beberapa wilayah Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut terutama ke limbah medis (Aini, 2019). Ini jadi bukti bahwa kunci utama dari pengelolaan sampah yang efektif adalah kesadaran dari diri sendiri. Bagi nagari-nagari yang telah berpartisipasi aktif dalam program ini, pemerintah memberikan insentif berupa dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan alat-alat penunjang, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi (Putra, 2025). Menariknya, setelah menerima dukungan tersebut, beberapa nagari semakin meningkatkan pelaksanaan program mereka. Sementara itu, bagi nagari yang baru menyadari pentingnya pengelolaan sampah, keberhasilan nagari lain menjadi inspirasi dan pemicu untuk ikut serta. Di sisi lain, ada juga nagari yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan sampah. Untuk yang seperti ini, pendekatan sosialisasi dan edukasi jadi langkah awal yang penting. Bahkan, kadang memang dibutuhkan "dorongan" dari pihak terkait agar masyarakat mau bergerak. Karena faktanya, kesadaran tidak selalu muncul secara otomatis, ada kalanya harus dipantik terlebih dahulu (Gusnayetti, 2022).

Efektivitas program “Sumbar Bersatu” semakin terasa karena sejalan dengan visi Asosiasi Bank Sampah Indonesia (Asobsi), yakni pengelolaan sampah modern yang tidak hanya bersifat pembuangan, tetapi juga memiliki nilai tambah ekonomi. Sampah diolah menjadi pupuk organik, pakan ternak, hingga produk bernilai ekonomi tinggi lainnya, sehingga mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, namun juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam ekonomi sirkular, dengan cara mengelola sampah secara berkelanjutan dan mendukung sistem ekonomi berbasis pengelolaan sumber daya yang ramah lingkungan sebagaimana yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan (Setiawan et al., 2025).

Meski belum menyeluruh, pelaksanaan program ini terus diupayakan agar berkembang lebih luas. Dukungan dari masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun kesadaran, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program. Kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah sendiri sebenarnya bisa dibentuk melalui sosialisasi yang konsisten dan juga pengaruh lingkungan sekitar (Putra, 2025). Banyak komunitas yang kini terlibat dalam program ini,

umumnya terbentuk dari individu-individu yang saling mengajak hingga akhirnya berkembang menjadi komunitas yang lebih besar. Tapi sayangnya, program ini belum berjalan merata di semua wilayah dan keberhasilannya masih tergantung pada dukungan lokal dan semangat komunitas. Dengan itu, secara keseluruhan, Program “Sumbar Bersatu” cukup efektif dalam membuka ruang partisipasi dan mendorong kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Tapi tentu saja, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada konsistensi, kesadaran individu, keterlibatan semua pihak dan yang paling penting yaitu kemauan masyarakat untuk berubah.

Implikasi penelitian ini adalah memberitahukan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa program Sumbar Bersatu ini wajib dimaksimalkan dengan baik karena memiliki dampak. Hal ini juga merupakan hasil dari penerapan kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan kolaboratif masyarakat pada program “Sumbar Bersatu” untuk pengelolaan sampah di Sumatera Barat yang bisa dikatakan memiliki hasil. Keterbatasan penelitian adalah belum adanya penunjang dan data bersifat angka yang memfokuskan kepada daerah tertentu yang lebih fokus, sehingga penting adanya kelanjutan dari penelitian ini yang lebih lingkup kecil.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa melihat perjalanan dan dampak dari program “Sumbar Bersatu”, kita bisa melihat betapa pentingnya peran kepemimpinan partisipatif dalam upaya mengelola sampah secara berkelanjutan. Bukan sekadar memimpin dari atas, pendekatan ini justru menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perubahan. Ketika masyarakat diajak berdiskusi, dilibatkan dalam keputusan, dan diberi ruang untuk berperan, hasilnya jauh lebih terasa: tumbuh kesadaran, muncul rasa memiliki, dan terbentuk kebiasaan baru yang lebih peduli lingkungan. Memang, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tidak semua wilayah memiliki tingkat kesadaran yang sama, dan tidak semua masyarakat langsung bisa berubah. Tapi justru di situlah nilai dari kepemimpinan partisipatif yang sabar, terbuka, dan terus mendorong perubahan dengan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Program ini sudah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah, bahkan jadi inspirasi bagi daerah lain. Tapi untuk menjaga agar program ini terus berjalan dan berkembang, butuh konsistensi, dukungan semua pihak, dan tentu saja, kemauan dari masyarakat sendiri untuk terus belajar dan berubah. Karena pada akhirnya, pengelolaan sampah

bukan hanya soal kebijakan, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap layak untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Kontribusi judul penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan terdapat empat hal yaitu: penguatan konsep kepemimpinan partisipatif. Penelitian ini memperkaya literatur ilmiah mengenai model kepemimpinan partisipatif dengan konteks penerapannya pada isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran pemimpin yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program lingkungan. Selain itu juga perlunya inovasi dalam strategi kolaboratif masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan strategi dan pendekatan kolaboratif yang berhasil diterapkan di Sumatera Barat melalui program "Sumbar Bersatu." Temuan ini dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi daerah lain dalam merancang program serupa. Dan terakhir adalah pengembangan teori dan praktik pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas. Dengan mengaitkan peran kepemimpinan dan partisipasi masyarakat, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Ini mendukung pendekatan desentralisasi dan pemberdayaan lokal dalam menangani permasalahan lingkungan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ada beberapa hal meliputi: pertama, perbandingan antar daerah. Disarankan dilakukan studi komparatif antara Sumatera Barat dan daerah lain di Indonesia untuk melihat perbedaan pendekatan kepemimpinan partisipatif dalam pengelolaan sampah serta faktor-faktor keberhasilannya. Kedua, pendekatan Kuantitatif terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat secara lebih terukur dan menguji hubungan statistik antara gaya kepemimpinan dan partisipasi aktif masyarakat. Dan studi peran teknologi dan media sosial. Rekomendasi berikutnya adalah meneliti peran teknologi informasi dan media sosial dalam mendukung kepemimpinan partisipatif dan memperkuat kolaborasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Akbar, M. R. (2023). *Pengaruh Ekonomi Dan Pelayanan Akademik Terhadap Kebahagiaan Mahasiswa Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Di Era Covid-19*. 3, 53–54.
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., & Guampe, F. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (1st Ed.). Pt. Mifandi Mandiri Digital.
- Aini, A. (2019). Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit Atau Limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) Di Sumatera Barat. *Jurnal Education And Development*, 7(1), 46.
- Akbar, M. R. (2024). *Pengaruh Indeks Keislaman , Pertumbuhan Ekonomi , Dan Ipm Terhadap Kebahagiaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Selat Malaka*. 8(2), 157–170. <https://doi.org/10.22236/Alurban>
- Burhanudin, B. (2005). *Analisis Administrasi Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Fitria, S., Purwaningrum, P., & Indrawati, D. I. (2018). Analisis Potensi Daur Ulang Sampah Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. *Proseding Seminar Nasional Cendekiawan*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.25105/Semnas.V0i0.3533>
- Gusnayetti, G. (2022). Analisis Dan Desain Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia Of Journal*, 4(3), 320–324. <https://doi.org/10.33559/Eoj.V4i3.489>
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Revista Brasileira De Linguística Aplicada* (1st Ed., Vol. 5, Issue 1). Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Herman, F. A. (2023). *Tpa Payakumbuh Ditutup Karena Longsor, 4 Wilayah Di Sumbar Terpaksa Kelola Sampah Sendiri*. [Tribunpadang.Com](https://tribunpadang.com).
- Insan, P. D., & Yuniawan, A. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Lingkungan Kerja, Kompensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Bagian Keperawatan Rsud Tugurejo Semarang). *Diponegoro Journal Of Management*, 15(1), 167.
- Lestari, A. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Stratejik Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1), 36. <https://doi.org/10.17509/Jap.V23i1.5580>
- Mahkamah Konstitusi. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945* (Vol. 105, Issue 3).
- Mohd Noor, M., Suyurno, S. S., Mohd Sairi, F., & Akbar, M. R. (2023). Badī‘ Al-Zamān Sa‘īd Nursī’s Approach Through Writing In Da‘Wah: A Study Of Effective Verbal Communication. *Al-Irsyad: Journal Of Islamic And Contemporary Issues*, 8(1), 1068–1076. <https://doi.org/10.53840/Alirsyad.V8i1.374>
- Muhsinhukum, M. (2021). Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 86–98. <https://doi.org/10.32520/Das->

Sollen.V6i2.1811

- Nasution, R. (2022). Peran Wanita Karir Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Ekonomi Islam. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 393–402. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i4.43>
- Peny, T. L. L., Gorang, A. F., & Hermayanti, H. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan Partisipatif, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Alor. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2(1), 34. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7639373>
- Permana, A. W., & Karwanto, K. (2020). Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dalam Upaya Meningkatkan Profesional Guru. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.26740/Jdmp.V5n1.P58-67>
- Putra, Y. M. (2025). Implementasi Sistem Informasi Transparansi Dan Efisiensi Pengelolaan Pendataan Sampah Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup). *Embistek*, 4(1), 67.
- Qorrotul A’yuni, S., & Hijrawan, R. (2020). Analisis Kritis Kepemimpinan Pendidikan Islam Berdasarkan Syarat Dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Ideal. *Al-Fahmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 32. <https://doi.org/10.54396/Alfahim.V2i2.94>
- Rahim, M. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Sipil Sains*, 10(1).
- Setiawan, F. G., Nefilinda, N., & Putri, R. E. (2025). Strategi Penanganan Sampah Di Pesisir Pantai Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. *Indonesian Research Journal On Education*, 5(2), 134. <https://doi.org/10.31004/Irje.V5i2.2287>
- Sipsn. (2025). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Sipsn) – Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Susnawati, T. (2018). Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Kebersihan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Dalam Menunjang Wisata Kelas Dunia. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(3).
- Wulandari, F., & Frinaldi, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Dinas Perempuan Terhadap Budaya Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasaya. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 3(1), 108–115. <https://doi.org/10.24036/Jmiap.V2i2.137>